

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PMDN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Siska Anggraini Putri

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya, e-mail : [thisiskha@gmail.com](mailto>thisiskha@gmail.com)

Hendry Cahyono

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh belanja daerah dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2014. Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Regresi linier berganda, Uji F, Uji T dengan uji asumsi klasik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan variabel belanja daerah Jawa Timur berpengaruh pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 hingga tahun 2014, dengan probabilitas sebesar 0.0253. Sedangkan variabel PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001 hingga tahun 2014, dengan probabilitas PMDN sebesar 0.4390 dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Kata kunci : Belanja Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

The purpose of this research is to find out the influence local budgets and domestic investment (domestic) to economic growth East Javanese from 2001 to 2014. To proving research hypothesis using econometrica model by multiply linier regression analysis by F-Test, T Test with the classical assumptions. The finding local budget has influences to growth East Javanese from 2001 to 2014 with probability amounts 0.0253. Although, domestic investment (domestic) has no influence to economic growth East Javanese from 2001 to 2014, with domestic investment (domestic) probability amounts 0.4390 by significant rate amounts 5%.

Keywords: local budgets, domestic investment (domestic) , economic growth

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu acuan untuk mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu hal yang selalu berkembang secara linier. Adakalanya perkembangan perekonomian pesat dan adakalanya berjalan lambat yang berarti tingkat kegiatannya lebih rendah dari masa sebelumnya.

Pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian disuatu daerah. Data belanja pemerintah yang bersumber dari Biro Keuangan Gubernur Jawa Timur menunjukkan belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada rentang

waktu tahun 2001-2014 selalu naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2004 dimana belanja daerah pada tahun tersebut sebesar 3516027.16 juta rupiah turun sebesar 16931.16 juta rupiah dari tahun 2003 yang sebesar 3532958,32 juta rupiah.

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2010).

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek Jawa Timur tahun 2015 menduduki posisi pertama dengan total realisasi Rp 35,5 triliun disusul Jawa Barat Rp 26,3 triliun, DKI Jakarta Rp 15,5 triliun, Jawa Tengah Rp 15,4 triliun dan Sumatera Selatan Rp 10,9 triliun. Dari uraian tentang peningkatan belanja pemerintah serta prestasi investasi Jawa Timur diatas seharusnya kedua hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, namun yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini yaitu tahun 2013-2014 justru sebaliknya. Dimana peningkatan belanja daerah serta prestasi investasi tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari paparan tersebut peneliti merasa perlu adanya sebuah penelitian mengenai "Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur"

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ? (2) Bagaimana pengaruh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ? (3) Bagaimana pengaruh belanja daerah dan PMDN secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk Mengidentifikasi pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. (2) Untuk Mengidentifikasi pengaruh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. (3) Untuk Mengidentifikasi pengaruh belanja daerah dan PMDN secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Sukirno (2007) pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kemunduran ekonomi menimbulkan implikasi ekonomi dan sosial yang merugikan masyarakat, pertambahan pengangguran, kemerosotan taraf kemakmuran dan kerusuhan-kerusuhan sosial adalah beberapa akibat penting yang akan timbul.

INVESTASI

Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu mendongkrak perekonomian suatu daerah. Investasi bisa berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, memperluas usaha atau menambah kapasitas serta menambah jumlah aktivitas barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja serta menambah peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat.

TEORI-TEORI INVESTASI

a. Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar menerangkan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

b. Teori Robert Solow

Menurut Robert Solow faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Model Pertumbuhan Solow ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan variabel tenaga kerja, serta memperkenalkan faktor teknologi.

c. Teori Schumpeter

Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan *entrepreneur* yakni golongan orang-orang yang yang mengoordinasi faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang yang diperlukan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pembaharuan dalam masyarakat. Kegiatan ini akan

mempertinggi pendapatan dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk memperbesar tingkat produksinya dan akhirnya akan mengadakan penanaman modal baru.

BELANJA DAERAH

Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Belanja Daerah itu sendiri menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TEORI-TEORI PENGELOUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002).

a. Teori Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah

$$Y = C + I + G.$$

Dimana :

C = konsumsi (consumption)

G = pengeluaran pemerintah (Government expenditures)

I = investasi (investment)

Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.. Dengan ini, juga dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan

ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Nkiru, 2013)

PENELITIAN TERDAHULU

Wihda (2014) dalam penelitiannya yang mengambil kasus penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menyatakan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya pengeluaran pemerintah dalam penelitiannya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I.Y Yogyakarta.

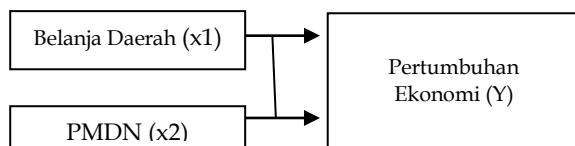
Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian dari Wahyuni (2014) yang analisisnya membahas tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang belanja daerah, PMDN dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2001 sampai tahun 2014. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistis terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan bantuan program EViews 8.

Sumber data merupakan asal, tempat atau lokasi data peneliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak di luar sasaran penelitian. Data penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistika, Badan Penanaman Modal, Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah dan institusi daerah terkait, jurnal, artikel, dan media online yang relevan. Data yang digunakan merupakan data time series 2000-2014.

Rancangan penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :



Populasi dari penelitian ini adalah belanja daerah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah belanja daerah, penanaman modal dalam negeri

(PMDN), serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2001-2014.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh melalui sumber data Badan Pusat Statistika, Badan Penanaman Modal, Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah dan institusi daerah terkait, jurnal, artikel, dan media online yang relevan.

Teknik penganalisaan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hubungan antara variabel ditentukan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi
 a = konstanta persamaan regresi
 b_1 = koefisien regresi untuk X_1
 b_2 = koefisien regresi untuk X_2
 x_1 = Belanja Daerah
 x_2 = PMDN
 ϵ = standart error

Selain itu terdapat uji Asumsi Klasik, normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi dilanjutkan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R²)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Belanja Daerah Jawa Timur
Tahun 2000-2014

Tahun	Perkembangan Belanja Daerah (%)
2001	
2002	53.96%
2003	20.38%
2004	-0.47%
2005	15.05%
2006	26.72%
2007	2.756%
2008	26.04%
2009	14.49%
2010	34.25%
2011	14.48%
2012	31.04%
2013	9.32%
2014	19.64%

Sumber : Biro Keuangan Gubernur Jawa Timur (diolah peneliti)

Data belanja pemerintah yang bersumber dari Biro Keuangan Gubernur Jawa Timur menunjukkan belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu tahun 2001-2015 selalu naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2004 dimana belanja daerah pada tahun tersebut sebesar Rp. 3.516.027.000.000 turun sebesar Rp. 16.931.000.000 dari tahun 2003 yang

sebesar Rp. 3.532.958.000.000. lalu ditahun 2005 naik 15.05% menjadi Rp.4.045.400.000.000, kemudian ditahun 2006 kembali naik 26.72% Rp.5.126.544.000.000. Kenaikan tak terlalu besar terjadi ditahun 2007 yang kenaikannya hanya sebesar 2.756%. Selanjutnya kenaikan belanja daerah kembali terjadi ditahun 2008 sebesar Rp. 6.639.780.000.000, tahun 2009 sebesar 7.602.038.000.000, tahun 2010 sebesar 10.206.317.000.000, tahun 2011 sebesar 11.684.563.000.000, tahun 2012 sebesar 15.311.542.000.000 dan tahun 2013 Selain itu belanja daerah ditahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan. Belanja pemerintah Jawa Timur untuk tahun terakhir 2014 sebesar Rp. 20.027.647.000.000 dan di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 16.738.657.000.000, belanja pemerintah Jawa Timur di Tahun 2014 sebesar Rp. 20.027.647.000.000 naik sebesar Rp. 18.860.300.000 dibandingkan dengan tahun 2001 yang hanya sebesar Rp. 1.906.055.000.000

PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI JAWA TIMUR

Tabel Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Timur Tahun 2001-2014

Tahun	Pertumbuhan PMDN (%)
2001	
2002	17.75
2003	90.94
2004	161.08
2005	36.04
2006	2935.09
2007	-90.02
2008	19.2
2009	27.58
2010	61.42
2011	-36.06
2012	76.49
2013	-15.88
2014	-8.19

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah peneliti)

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam angka dalam berbagai tahun terbitan. Pada tahun 2001 PMDN Jawa Timur sebesar Rp.690.831.000.000, kemudian ditahun 2002 naik menjadi Rp.813.441.000.000, lalu ditahun 2003 PMDN kembali naik menjadi Rp.1.553.224.000.000, ditahun 2004 ke 2005 nilai investasi PMDN di Jawa timur mengalami kenaikan sebesar Rp.1.461.585 juta rupiah yang pada awalnya tahun 2004 sebesar Rp.4.055.266.000.000 menjadi Rp.5.516.851.000.000 pada tahun 2005. Pada tahun 2005 sampai tahun 2006 investasi PMDN mengalami kenaikan terbesar selama tahun 2004 sampai tahun 2014 yaitu sebesar Rp.161.924.678 juta rupiah dari Rp.5.516.851.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp.167.441.529 .000.000 pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007

total nilai investasi menurun cukup banyak menjadi Rp.16.705.091.000.000 hampir separuh dari total nilai investasi tahun 2006. Selama periode tahun 2007 sampai tahun 2010 investasi PMDN yang ada di Jawa Timur selalu mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp.16.705.091.000.000 ditahun 2007, Rp.19.912.810.000.000 ditahun 2008, 25.405.226.000.000 ditahun 2009, dan 41.009.463.000.000 di tahun 2010. Namun pada tahun 2011 investasi PMDN Jawa Timur mengalami penurunan sebesar Rp.14.769.842.000.000 dari Rp.41.009.463.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp.26.239.621 .000.000 pada tahun 2011. Lalu PMDN Naik kembali menjadi Rp.46.310.912 .000.000 pada tahun 2012 . Namun pada tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami penurunan berturut-turut menjadi Rp.3.895.4462.000.000 pada tahun 2013 dan 35.724.063 Juta Rupiah pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2015 PMDN Jawa Timur turun menjadi Rp.35.489.794 .000.000

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR

Tabel Penanaman Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2001-2014

Tahun	Perkembangan pertumbuhan ekonomi
2001	0
2002	0.05
2003	0.98
2004	1.05
2005	0.01
2006	-0.04
2007	0.31
2008	-0.17
2009	-0.93
2010	1.67
2011	0.54
2012	0.05
2013	-0.72
2014	-5.58

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah peneliti)

Selama kurun waktu tahun 2001-2005 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. yaitu 3.75% ditahun 2001, 3.8% ditahun 2002, 4.78% ditahun 2003, 5.83% ditahun 2004, dan 5.84% ditahun 2005. Namun data di tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,80%, lebih rendah daripada tahun 2005 yang sebesar 5,84%. Selanjutnya di tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan sebesar 6,11% lalu di tahun 2008-2009 kembali mengalami penurunan 5,94% di tahun 2008 dan 5,01% di tahun 2009. Pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan sebesar 6,68% di tahun 2010, 7,22 di tahun 2011 dan 7,27 di tahun 2012. Namun dalam rentang tahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami

penurunan yang signifikan yaitu 6,55% di tahun 2013, 5,86% di tahun 2014.

ANALISIS DATA

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Jika $\text{Prob.Obs.R2} < \alpha$ maka data tidak normal sebaliknya $\text{Prob.Obs.R2} > \alpha$ data normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan program Eviews 8.0 diketahui bahwa hasil Probability $0.519790 > \alpha (0.05)$. Hal tersebut menandakan bahwa data adalah normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi juga mengandung hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dari hasil uji Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test dapat kita ketahui bahwa nilai $\text{Obs}^*R\text{-square} = 0.1174 > 0.05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari hasil uji white heterokedastisitas dapat kita ketahui bahwa nilai $\text{Obs}^*R\text{-square} = 0.3949 > 0.05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat heterokedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah variabel bebas saling berkorelasi atau tidak, maka dilakukan uji multikolinieritas. Salah satu cara untuk mendekripsi gejala multikolinieritas dengan melihat korelasi antar variable bebas. Korelasi dikatakan kuat jika koefisien korelasi diatas batas toleransi yaitu 0,8 atau lebih. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan korelasi antara belanja daerah dengan PMDN sebesar 0.188617. Karena korelasi antara belanja daerah dengan PMDN sebesar $0.188617 < 0.8$, maka, korelasi antar variabel bebas dibawah batas toleransi maka tidak terdapat multikolinieritas.

Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan program eviews 8.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{PE} = 4.670914 + 1.13E-07 \text{ PE} + 4.76E-09 \text{ PMDN}$$

Dari persamaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut

- Nilai konstanta sebesar 4.670914 menunjukkan bahwa jika nilai PMDN Belanja Daerah nol

maka Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4.67091438876.

- $\text{Belanja Daerah} = 1.13E-07 \text{ PE}$ artinya jika variable Belanja Daerah bertambah 1%, sedangkan variable PMDN tetap maka Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 113.48%. Tanda positif (+) menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Belanja daerah dengan Pertumbuhan ekonomi. Jika Belanja daerah tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga tinggi.

- $\text{PMDN} = 4.76E-09$ artinya jika variable PMDN bertambah 1%, sedangkan variable belanja daerah tetap maka Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 476.10%. Tanda positif (+) menunjukkan adanya hubungan yang searah antara PMDN dengan Pertumbuhan ekonomi. Jika PMDN tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga tinggi.

PENGUJIAN HIPOTESIS

a. Uji Signifikansi Individu (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

- Uji t terhadap belanja daerah
Dari hasil uji t diketahui nilai probabilitas yang dimiliki belanja daerah adalah 0.0253 atau lebih kecil dari $\alpha (0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
- Uji t terhadap PMDN
Dari hasil uji t bahwa diketahui nilai probabilitas yang dimiliki PMDN adalah 0.4390 atau lebih besar dari $\alpha (0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

b. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas untuk F sebesar $0.043984 < 0.05$ jadi kesimpulannya belanja daerah dan PMDN bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

c. Koefisien determinasi (R2)

Dari hasil uji R2 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.433334. Hal ini menunjukkan 43.33% peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi belanja daerah dan PMDN, sedangkan sisanya sebesar 56.67% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Dari hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dimiliki belanja daerah adalah 0.0042 atau lebih kecil dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberpengaruhannya ini dikarenakan belanja daerah Jawa Timur pada rentang waktu tahun 2001-2014 selalu naik setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2004. Belanja provinsi Jawa Timur meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak langsung. Dimana belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, dan belanja bantuan sosial. Serta belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya, belanja asset lainnya. Kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengakomodasi aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

PENGARUH PMDN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Variable PMDN tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hasil temuan diatas sesuai dengan pendapat Keynes, yang menyatakan tingkat kegiatan ekonomi tidak ditentukan oleh pembentukan modal, bahkan peran investasi atau pembentukan modal dalam teorinya diabaikan sama sekali. Dalam analisisnya Keynes lebih menekankan kebijakan fiskal. Ia beranggapan dengan kebijakan fiskal pemerintah dianggap bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Walau ada teori pertumbuhan Ekonomi baru dari Harrod Domar yang, menerangkan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Namun konsep pengertian mengenai pertumbuhan ekonomi Harrod Domar diatas mempunyai keterbatasan teori pembangunan dan pertumbuhan dimana 1) *Marginal Propensity to Save* (MPS) bersifat konstan, padahal dalam kenyataannya MPS dan ICOR berubah dalam jangka panjang sehingga memodifikasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan yang diinginkan, 2) proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap, padahal dalam kenyataannya antara tenaga kerja dan modal dalam kegiatan produksi dapat saling mensubtitusi, 3) harga konstan padahal dalam kenyataannya perubahan harga dapat terjadi sepanjang waktu, 4) suku bunga tetap dalam kenyataannya suku bunga dapat terjadi sepanjang waktu sehingga mempengaruhi nilai investasi, 5) mengabaikan program

pemerintah, 6) mengabaikan wiraswasta, 7) kegagalan membedakan barang modal dan konsumsi, 8) dsn ketidakstabilan dalam sistem ekonomi bukan faktor langkahnya modal tetapi akses permintaan dan penawaran (Jhingan dalam Badrudin, 2012).

Ketidak berpengaruhannya PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sarana dan prasarana seperti akses jalan yang kurang baik dan perlu dibenahi kembali. Seperti jalan yang rusak dan rawan banjir semisal adanya bencana lumpur lapindo yang jika musim penghujan luapan lumpur lapindo akan menggenangi bahkan membanjiri jalur penghubung antar kota.

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PMDN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Melalui uji F dapat terlihat hasil uji F diperoleh nilai probabilitas untuk F sebesar $0.043984 < 0.05$. Sehingga variabel belanja daerah dan PMDN mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Keberpengaruhannya ini dikarenakan sejak dilakukan kebijakan-kebijakan dibidang investasi beberapa tahun ini. Seperti kemudahan mengurus perijinan, Pro-Investasi, dengan insentif & pajak yang menarik serta didukung oleh pemerintah yang responsive dapat menarik kepercayaan investor. adanya beberapa perbaikan sarana dan prasarana diberbagai titik. Peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, penambahan runway Bandara Internasional Juanda, mempercepat pembangunan jalan tol pengganti di wilayah porong Sidoarjo, pembangunan beberapa jalan baru seperti MERR di Surabaya, pembangunan jalur alternatif Banyuwangi yang melewati Glenmor sehingga tidak harus melewati Gunung Gumitir yang rawan kecelakaan serta peroperasionalan bandara blimbingsari di Banyuwangi. Selain itu hal ini dikarenakan pengelolahan APBD yang mulai efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.S
- Deliarnov. 2010. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gujarati, Damodar. 2005. *Basic Econometric*, 4th Edition, McGraw-Hill.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2008. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM
- Nachrowi dan Hardius Usman. "Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sinambela, Lijan Poltak. 2004. Metode Penelitian Kuntitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Statistik, Badan. Pusat. Jawa Timur dalam angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sulyanto. 2011. Ekonomika Terapan Teori dan Aplikasi Dengan SPSS. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Todaro, Michael And Smith, Stephen. 2002. Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Unit Penerbit dan Percetakan ijSekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.

KESIMPULAN

1. Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena kemampuan pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah dari tahun ke tahun menimbulkan berbagai perubahan-perubahan dalam hal potensi-potensi unggulan dalam bidang sehingga meningkatkan perekonomian.
2. Penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ketidak berpengaruhannya PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur disebabkan oleh sarana dan prasarana Kota dan Kabupaten Surabaya yang sebelum tahun 2010 yang masih kurang baik, padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh menekan biaya distribusi yang pada akhirnya akan mengefektifkan perekonomian.
3. Belanja daerah dan Penanaman modal dalam negeri secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Keberpengaruhannya ini disebabkan karena keberhasilan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan perekonomian, seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan baru, perijinan.

SARAN

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah ke belanja pembangunan atau belanja publik seperti membiayai proyek-proyek infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pengembangan ekonomi diberbagai sektor.
2. Provinsi Jawa Timur harus memperbaiki sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan penanaman modal seperti akses transportasi antar wilayah di Jawa Timur guna menekan biaya distribusi yang pada akhirnya akan mengefektifkan perekonomian.

